

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Pada tinjauan pustaka ini dalam bagian landasan teori akan dijelaskan beberapa konsep teori yang dimana akan sangat berguna dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti, teori yang pertama yaitu teori elit politik yang dimana akan sangat berguna dalam menganalisis bagaimana jenis dan konsep-konsep yang terdapat dalam meninjau permasalahan dari sudut pandang elit politik. Teori yang kedua yaitu teori partisipasi politik yang dimana akan sangat berguna dalam menganalisis bagaimana jenis dan konsep dari partisipasi politik yang terjadi dalam penelitian ini, kedua teori ini diharapkan akan sangat berguna dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang akan diteliti.

1. Teori Elit Politik

Dalam studi mengenai struktur sosial terdapat golongan minoritas yang dimana dapat memberikan perintah dan memiliki kekuasaan yang biasa disebut dengan elit, elit ini merupakan kelompok minoritas yang dimana bertugas untuk melayani kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial dan bernilai sosial dan elit inilah yang sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu yang superior.

Menurut pengertian sosiologis dan politis, elit merupakan the ruling class yaitu dimana golongan tertentu yang memiliki kendali dan kekuasaan secara formal dan informal dalam suatu strata sosial. Dengan itu mereka

dapat mempengaruhi hubungan masyarakat yang dimana hubungan tersebut bersifat timbal balik, hubungan antar elit juga sangat kental terjalin biasanya diantara elit satu dengan yang lainnya dimana hal tersebut dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya sebagai bahan evaluasi dan cara untuk memberikan timbal balik atas kepentingan mereka.

Elit secara struktural yaitu orang-orang profesional dan mereka para intelektual, namun pada akhirnya mereka dibedakan dengan fungsi yang dimana elit fungsional berbeda dengan elit politik. Elit menurut Suzanne Keller elit terbagi menjadi dua kelompok yang dimana diantaranya yaitu elit yang pertama elit tunggal atau elit politik dan elit yang kedua yaitu elit yang dimana berbagi kekuasaan, kewajiban dan tanggung jawab dengan imbalan serta hak-hak yang adil (Halim : 2018). Pareto menyebutkan bahwa setiap manusia di pimpin oleh sekelompok kecil individu yang dimana memiliki kualitas dalam ilmu pengetahuan dan politik, dan Pareto mempertegas bahwa elit-elit ini berasal dari latar belakang yang sama dengan contoh para konglomerat atau ahli. Dan Pareto menggambarkan bahwa para elit ini adalah manusia dari setiap individu yang dimana menempati atau menduduki tingkat tertinggi diantara yang lainnya.

Gaetano Mosca pun sependapat dengan Pareto yang dimana kehidupan manusia ini terbagi menjadi dua golongan yang dimana terdapat mereka yang memimpin dan mereka yang dipimpin, dan Mosca menjelaskan hubungan yang sangat dinamis antara elit dan massa maka dengan pandangan ini Mosca menggambarkan bahwa para elit bukan hanya sekedar ingin mengangkat dirinya melebihi masyarakat lainnya namun juga ingin

mempertahankan kedudukannya atas apa yang ada dibawah kendali atau kuasanya. Maka dengan itu Mosca menyatakan dengan itu bahwa disetiap kehidupan masyarakat akan selalu ada dimana terdapat sekelompok kecil orang-orang yang dimana memiliki kendali dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat tersebut (Halim : 2018).

Elit politik terbagi menjadi dua yang diantaranya yaitu elit politik lokal dan elit non politik, dengan ini keduanya tentu memiliki banyak perbedaan dari segi fungsi dan aspek sosialnya. Maka keduanya dibedakan sebagai berikut:

a. Elit Politik Lokal

elit inilah yang dimana juga sering disebut sebagai elit birokrasi atau elit pemerintah lokal yang dimana elit pemerintah ini berfungsi sebagai pelayan dari masyarakat yang baik maka dengan terciptanya pemerintah yang baik akan sangat dibutuhkan sinkronasi antara cita-cita desentralisasi melalui otonomi melalui proses demokratisasi di setiap daerah (Halim : 2018). Di dalam dunia demokrais para pejabat negara baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah pelayan bagi rakyat bukan tuan atau juragan. Demikian dengan elit politik dan para pejabat negara di daerah harus bisa membuka gerbang aspirasi untuk dapat mendengarkan suara dari masyarakat dan harus mampu memberikan ruang agar bisa menampung partisipasi dari masyarakat yang jelas kuantitas serta kualitasnya.

Elit pemerintah lokal memiliki fungsi utama yaitu menjaga kerukunan warga masyarakatnya, pemerintah lokal harus bersikap

tanggap dan mampu menjadi penengah atas terjadinya berbagai macam konflik di daerah. Dan elit politik lokal harus mampu memerankan dirinya sebagai perekat dan pengayom yang baik bagi warganya, maka dalam konteks ini pemerintah tidak boleh bertindak diluar konteks atau diluar kewenangan bahkan bertindak diskriminatif terhadap sekelompok mayoritas atau bahkan minoritas. Elit pemerintah hakikatnya bermaksud berkuasa guna meregulasikan kebijakan maka dengan bermaksud berkuasa tersebut elit pemerintah harus mampu mengoptimalkan atas dasar kemanusiaan dan kerukunan antar warga.

b. Elit Non Politik

Elit non politik inilah merupakan elit politik yang memiliki fungsi serta ruang lingkup yang berbeda dengan elit politik diatas, elit non politik inilah yang dimana memiliki kuasa atau pengaruh tertentu didalam lapisan masyarakat dan mampu mempengaruhi atas apa yang terjadi di masyarakat tersebut baik secara formal atau informal. Elit non politik tersebut pun terbagi menjadi 4 jenis elit yang dimana terdapat di masyarakat yang diantaranya yaitu:

i. Elit Ekonomi

Elit ekonomi di daerah yaitu berperan sebagai agen yang sangat strategis dalam perpolitikan lokal, dengan itu maka hal ini mencerminkan ranah-ranah yang di mana dimasuki oleh para elit ekonomi tersebut. Peran para elit ekonomi di daerah biasanya

dicirikan dengan adanya keinginan dari mereka untuk memiliki dan menguasai aset serta lahan yang ada di daerah.

Dalam sistem politik yang oligarkis bahkan otoriter sekalipun, elit ekonomi ini biasanya masuk kedalam ranah birokrasi dengan oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan. Seperti ulasan yang di sebutkan oleh Vedi R. Hadiz tentang kekuasaan Soeharto mengenai kekuasaan yang otoriter dan sanggup bertahan lama dengan perlahan-lahan menjadikan kekuasaan yang bersifat oligarki dengan watak para kapitalis, dengan demikian hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan para elit politik (Halim : 2018). Dominasi yang dilakukan oleh elit ekonomi baik di pemerintahan pusat atau daerah sekalipun menciptakan budaya atau kultur politik yang dimana berbasiskan modal, modal atau uang menjadi panglima dalam membuat kebijakan politik.

Menurut Richard Robinson, dominasi yang dilakukan oleh elit politik telah berlangsung sejak lama semenjak era kemerdekaan (Halim : 2018). Hubungan antara pelaku bisnis dengan para tokoh birokrat sudah ada semenjak dahulu yang dimana mempengaruhi para birokrat ini dalam membuat keputusan-keputusan. Terdapat juga jenis elit ekonomi yang dimana membaaur dengan partai politik, sebagai mesin politik tentunya sebuah partai membutuhkan biaya yang sangat besar demi menunjang kebutuhan dari partai dan aspek-aspek dari partai itu sendiri. Aktivis merka yang bergerak

dalam partai pun tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan hal tersebut merupakan aktivitas intervensi.

Selain elit ekonomi yang terdapat di dalam struktur politik, ada pula elit ekonomi yang bergerak diluar struktur tersebut. Elit ekonomi yang berada diluar struktur politik inilah yang dimana berperan sebagai pengontrol kekuasaan melalui jaringan bisnis dan modal yang dimilikinya yang diantaranya bertujuan untuk menjaga eksistensi dan perkembangan bisnis mereka, sebenarnya para elit ini juga tidak berambisi untuk masuk kedalam struktur kekuasaan akan tetapi mereka memiliki modal yang dimana mampu membuat pemerintah daerah bertekut lutut dengan cara memonopoli kekuasaan.

ii. Elit Agama

Elit agama yang terdapat di daerah sangatlah berperan penting dalam perpolitikan lokal, yang dimana elit agama mempunyai modal yang berupa simbolik, jemaah, pengetahuan agama dan kharisma. Sering kali dalam pemilihan umum setiap para calon akan dengan gencar untuk mendatangi pondok-pondok pesantren atau rumah dari para kyai dan rumah para ustad untuk mencari restu politik dan doa, dengan itu terlihat bahwa pengaruh elit agama sangatlah besar terhadap masyarakat. Terdapat timbal balik antara agama dengan kebijakan yang ada di tingkat lokal dan bukan hanya sekedar elit agama saja yang bisa mempengaruhi masyarakat di tingkat lokal akan tetapi sekelompok orang yang dianggap ahli

dalam urusan keagamaan, terseretnya aktivitas agama kedalam aktivitas yang bersifat politik akan berpengaruh terhadap peluang dan kekuatan dalam memperebutkan kekuasaan, saat seorang tokoh agama terjun kedalam dunia politik maka praktik-praktik keagamaan dialihkan menjadi ajang untuk menggalang dukungan politik.

Terjunnya elit agama ke dalam ranah perpolitikan menjadikan agama bercampur dengan kepentingan-kepentingan dan aktivitas politik dari sanalah mukai lahir dan muncul dimana terdapat politik beraliran agama, terjunnya para elit agama mulai semarak dan buming dimasyarakat yaitu ketika rezim Presiden Soeharto runtuh yang dimana dengan munculnya politik berbasis agama inilah selayaknya cendawan dimusim kemarau. Sebagian besar para elit agama ini meyakini bahwa politik tidak akan bisa dipidsahkan dari agama secara formal karena politik sangat melekat dengan agama dan para elit agama sangat menolak keras dengan adanya skulerisasi terhadap agama dan politik, dan banyak pula elit agama yang berpandangan bahwa agama adalah sebagai dasar dari etika sosial dimana secara formal harus terpisah dari politik, keterkaitan antara agama dan plitik diwujudkan melalui upaya peningkatan nilai-nilai universal agama di dalam masyarakat dengan contoh yaitu nilai keadilan kemanusiaan, dan nilai keagamaan dimasyarakat.

iii. Elit Sipil

Elit sipil merupakan masyarakat sipil yang tinggal di daerah, elit ini merupakan salah satu bentuk elit yang memiliki banyak kategori yang dimana diantaranya yaitu elit organisasi keagamaan, pemuka adat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, komunitas petani, komunitas nelayan, pengurus komunitas seni dan kebudayaan serta pengurus atau komunitas lainnya (Halim : 2018). Masyarakat ini tidak memiliki modal religius sebagaimana yang dimiliki oleh elit agama, melainkan modal yang mereka miliki merupakan modal-modal sosial dan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bersifat akar rumput.

Dengan itu maka elit sosial masyarakat merupakan representasi dari elit masyarakat yang dimana menjadi penggerak dari masyarakat sosial, atau yang lebih tepatnya bisa disebut dengan kekuatan sosial menurut Huntington yang dimana bisa meliputi kelompok etnis, teritorial, dan status serta bukan cerminan dari sekelompok orang yang memiliki atau memegang modal tertentu. Namun yang dimaksud dalam masyarakat sipil disini adalah mengenai kekuatan masyarakat tersebut didalam negara atau struktur kekuasaan. Maka dengan itu semua orang atau semua masyarakat sosial yang ikut terlibat didalam suatu tindakan politik maka bisa diasumsikan sebagai anggota kelompok sosial tersebut.

Peran dari elit sosial di masyarakat sangatlah penting karena mereka lebih dekat dengan masyarakat, misalnya saja pemuka adat.

Sudah terlihat jelas bahwa mereka adalah pihak yang membawahi sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat di bawahnya karena itu elit ini dapat dengan mudah memobilisasi masyarakat dalam menentukan program-program yang ingin dicapai didaerahnya, sebuah sistem politik yang baik dan sehat tentunya di hasilkan dari masyarakat sipil yang baik dan sehat pula. Yang dimana sebagai pengontrol dari kekuasaan, dengan contoh pada masa runtuhnya orde baru yang dimana negara melemah akan tetapi masyarakat sipil menguat dan bangkit maka oleh sebagian kalangan masyarakat hal tersebut merupakan suatu ancaman bagi negara karena negara tidak memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, namun menurut Vedi R. Hadiz yang memiliki pandangan berbeda. Menurut Hadiz pasca runtuhnya soeharto dengan negara yang melemah tidak dapat dipungkiri pula terdapat perpecahan antara masyarakat sipil yang tidak menentu di setiap daerahnya.

Ada nilai yang dimana perlu dilakukan oleh elit sosial tersebut kdi daerah, yang diantaranya yaitu para elit sipil ini dituntut harus mampu menumbuhkan daya pikir yang kriitis di masyarakat terutama yaitu dengan menumbuhkan pemikiran dan sikap yang kritis masyarakat terhadap pemerintah yang dimana hal tersebut dilakukan yaitu bertujuan sebagai kontrol masyarakat bagi pemerintah agar menjalankan pelaksanaannya sesuai dengan kehendak rakyat. Dan bukan sebaliknya yang malah menindas

rakyat di atas kepentingan-kepentingan elit tertentu. Hal tersebut harus diperjuangkan oleh elit masyarakat yang berada di daerah dalam rangka memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat di daerah.

Dan satu lagi peran dari elit masyarakat daerah yang dimana bertugas untuk bisa mengayomi dan menjalin kerukunan antar masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat jangan sampai elit masyarakat inilah yang menjadi pemicu munculnya konflik horizontal dimasyarakat, dan elit sosial masyarakat ini hendaknya tidak menjadi pendukung salah satu partai atau calon di daerah melainkan membebaskan warganya untuk menentukan dan memilih. Selain itu juga tugas para elit masyarakat di daerah dalam mengawasi persaingan para kandidat agar tetap sportif dan tidak mengarah pada tindakan-tindakan yang bersifat negatif, seperti perang saudara bahkan konflik antar pendukung.

iv. Elit Golput

Elit lain yang sekarang ini perannya sangat berpengaruh terhadap kelangsungan di kehidupan masyarakat, elit ini biasa disebut dengan elit masyarakat golongan putih atau golput (Halim : 2018). Perilaku seperti ini sangatlah berpengaruh kuat terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya dan mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat di daerah. Golput sekarang ini sudah menjadi kekuatan sosial yang dimana sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pemilu atau pilkada, melambungnya angka pemilih

golput ini disebabkan karena adanya ketidak perdulian masyarakat terhadap politik dan masyarakat sudah jenuh dengan aksi para politisi yang suka mengumbar janji dan berbohong serta oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi. Dan sejak era reformasi tren golput di Indonesia cenderung meningkat menurut pengamatan Bismar Arianto pengamat politik desa (Halim : 2018).

Burhanudin juga menyatakan bahwa kelompok golput atau kelompok golongan putih ini sangatlah mengkhawatirkan karena perkembangannya sangat cepat apabila dibandingkan dengan negara lain, Burhanudin mencontohkan bahwa di Amerika kelompok golput mengalami peningkatan sebesar 40% dalam kurun waktu 200 tahun tergolong peningkatan yang cukup kecil jika melihat kurun waktu yang sangat panjang dan lama. Peningkatan dan penyebaran angka golput dari tahun ke tahun di daerah teruslah meningkat dan dapat mengganggu proses demokrasi yang dilaksanakan di Indoneisa, karena secara falsafah demokrasi bukan berarti apa-apa jika tanpa ada dukungan dari rakyat artinya demokrasi sangatlah membutuhkan dukungan masyarakat secara penuh dan atas kesadaran mereka sendiri. Namun dengan adanya tindakan dari para pemimpin yang selalu mengumbar janji palsu dan kebohongan serta korupsi yang dilakukan maka masyarakat merasa jenuh dan hilang kepercayaan terhadap pemerintah, karenanya para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh dan dapat mempengaruhi masyarakat

hendaknya merubah pola pikir konstruktif demokratis dan sekaligus pada saat yang sama sikap elit politik juga harus bisa sesuai dengan keinginan masyarakat dan nilai serta moralitaslah yang menjadi indikator perilaku utama.

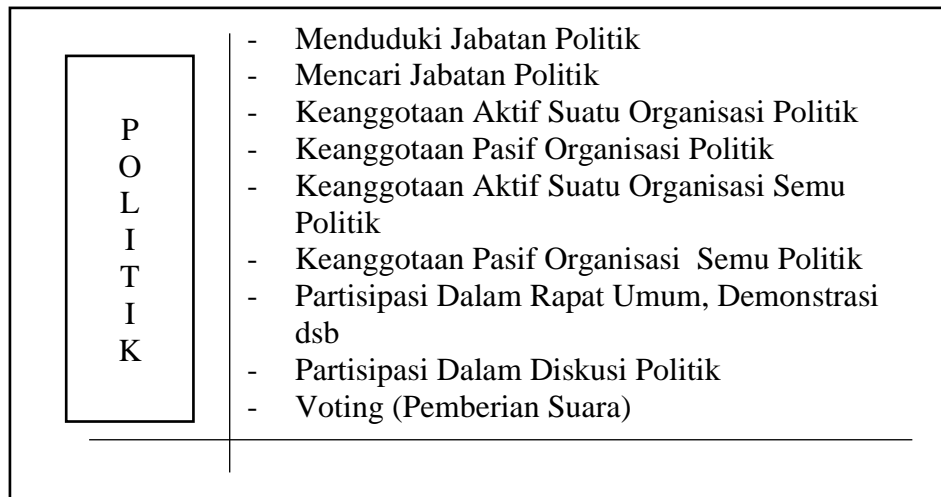
Dengan teori elit politik ini maka penulis akan dengan mudah menganalisis bagai mana proses dan strategi dari para elit lokal tersebut dalam memobilisasi dan merubah mainset atau pemikiran masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, hal tersebut dapat di analisis menggunakan teori tersebut secara satu persatu. Tentunya setiap elit lokal memiliki cara dan tehnik yang berbeda-beda dalam memobilisasi masyarakat, dan untuk Partisipasi masyarakat dalam Pilkades di Desa Datar Tahun 2019 terdapat banyak elit yang dimana menjadi tim sukses dari para calon kades tersebut. Dengan cara dan strategi yang berbeda dari setiap elit tentunya.

2. Teori Partisipasi Politik

Dalam analisis politik moderen partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan menjadi dalah satu yang banyak dipelajari dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang (Miriam : 2008). Studi pada partisipasi politik sendiri memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utamanya, akan tetapi dengan banyaknya bermunculan kelompok-kelompok yang juga sangat ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Secara umum partisipasi politik dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari seorang

individu atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yang diantaranya dengan memilih pemimpin baik itu secara langsung atau tidak langsung.

Gambar 1. Hierarki Partisipasi Politik



Sumber Gambar. Yoyoh Rohaniah, (P.Ilmu Politik halaman 483)

Rush dan Altop mengajukan hierarki partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik, dan bagi mereka hierarki yang paling simpel serta kompleks dan sangat berarti adalah hierarki yang didasarkan atas taraf atau luasnya partisipasi. Hierarki yang tergambar di atas yaitu dengan maksud untuk mencakup seluruh jajaran partisipasi politik untuk dapat diterapkan diseluruh bentuk sistem politik, pembagian yang terdapat pada gambar tentunya menjadi pembeda diantara banyaknya sistem politik tersebut dan tingkatan-tingkatannya yang sangat berpengaruh besar terhadap suatu sistem dan akibat kecil yang sama sekali tak berpengaruh terhadap sistem lainnya.

Herbet McColsky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung didalam proses penentuan kebijakan umum. Hal yang menjadi sorotan utama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk memenuhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas yaitu untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat.

Menurut Samuel P. Huntington dan M. Nelson memberi tafsiran yang luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan, menerangkan bahwa Partisipasi Politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembueatan keputusan oleh pemerintah. Dan partisipasi tersebut bisa bersifat individual dan kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Jadi partisipasi politik merupakan kegiatan yang absah dari masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan politiknya, maka dengan itu terdapat masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur dan mereka dapat mempengaruhi untuk keputusan yang mengikat.

Dari penjelasan tersebut jelas bahwa partisipasi politik erat sekali kaitanya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah keudian orang akan menuntut diberikan hak suara dalam penyelenggaraan pemerintah (Yoyoh : 2015). Perasaan kesadaran seperti ini dimuali dari orang yang berpendidikan, yang kehidupan yang lebih baik,

dan orang-orang yang terkemuka. Jika tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dan dalam setiap hubungannya dapat dikatakan bahwa hampir di setiap kegiatan partisipasi akan selalu ada unsur tekanan atau manipulasi, ada pula pendapat bahwa partisipasi politik hanya mencakup kegiatan yang bersifat positif. Akan tetapi Huntington dan Nelson menganggap bahwa kegiatan terdapat unsur destruktifnya seperti demikrasi, teror, pembunuhan politik dan lain-lain.

Gabriel A. Almond mengkategorikan bahwa partisipasi di setiap negaranya yaitu terbagi menjadi dua jenis, yaitu diantaranya Partisipasi Politik Konvensional dan Partisipasi Politik Nonkonvensional. Partisipasi politik konvensional yaitu dimana partisipasi berjalan secara normal dan merupakan sebuah bukti dari adanya demokrasi moderen, sedangkan untuk partisipasi politik nonkonvensional yaitu merupakan suatu bentuk partisipasi yang dimana berbentuk petisi, revolusi bahkan dalam bentuk kekerasan.

Dengan itu maka pemikiran Gabriel A. Almond mengenai partisipasi politik yang terbagi menjadi dua yang diantaranya partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional dibedakan sebagai berikut dalam bentuk tabel.

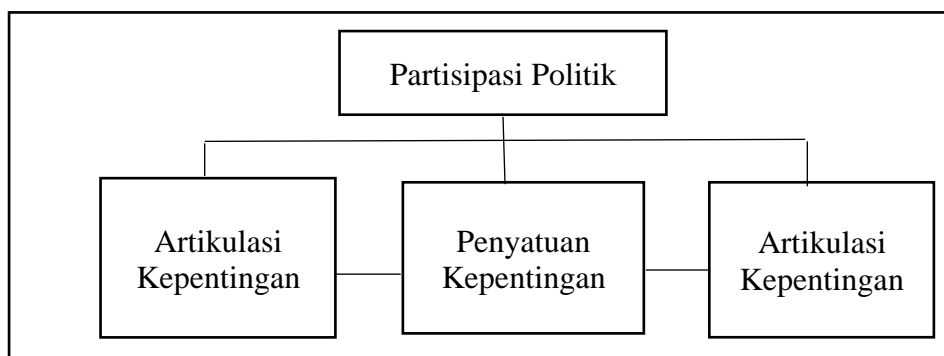
Tabel 1. Perbedaan Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian hak suara 2. Diskusi/Pembahasan Politik 3. Kegiatan kampanye atau promosi 4. Membentuk suatu kelompok yang berkepentingan atau tergabung didalamnya 5. Adanya komunikasi antara individu dengan pejabat politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian dalam bentuk petisi 2. Berdemonstrasi/Aksi masa 3. Konfrontasi 4. Mogok (Pemberhentian secara serentak) 5. Tindakan kekerasan atau anarkis dengan melakukan pembakaran atau merusak harta dan benda 6. Tindakan kekerasan terhadap individu yang diantaranya penganiayaan, pengeroyokan dan bahkan penculikan 7. Perang saudara atau grilya

Sumber gambar : Almond dalam Mas'ood dan Macandrews (2008)

Dan dalam partisipasi politik juga terdapat suatu bentuk yang dimana menjelaskan bagaimana cara terjadinya atau terbentuknya suatu partisipasi politik tersebut, dan berikut ini adalah gambar yang dimana menjelaskan bagaimana partisipasi politik tersebut terjadi.

Gambar 2. Partisipasi Politik Menurut Gabriel Almond



Sumber Gambar. P.umarudin Sahid, op, (dalam P.ilmu Politik : 2015)

Maka dengan itu penulis akan menggunakan teori ini dalam penusunan kerangka berfikirnya dalam menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan Pilkades di Desa Datar Tahun 2019, karena dalam teori ini menunjukkan bahwa para pakar-pakar tersebut menyebutkan dalam partisipasi politik terdapat keikutsertaan individu atau kelompok-kelompok tertentu didalam menentukan atau mempengaruhi kebijakan. Dan dalam Pilkades di Desa Datar Tahun 2019 menunjukkan terdapat beberapa mobilisasi yang dilakukan oleh para elit lokal yang dimana terlihat di dalam tindakan masyarakat dalam menentukan pilihannya di dorong oleh imbalan materi atau bahkan dorongan dari tokoh adat yang mengarahkan terhadap calon tertentu.

3. Teori Operasional dan Konsep

Menurut definisinya secara umum maka dapat dikatakan bahwa operasional ini merupakan salah satu dari suatu konsep yang dimana memiliki sifat abstrak yang dapat digunakan guna memudahkan dalam melakukan suatu pengukurann terhadap variabel atau objek, yang dimana juga bisa didefinisikan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu peristiwa ataupun kegiatan pengerjaan dari sebuah penelitian. Serta dapat juga digunakan sebagai sebagai sarana untuk menjabarkan variabel-variabel yang muncul dari sebuah penelitian ke dalam indikator-indikator yang lebih lengkap dan jelas. Jika dilihat secara umum sebenarnya definisi dari operasional itu sendiri terdapat tiga tipe yang diantaranya sebagai berikut :

a. Definisi Operasional Tipe A

Definisi Operasional yang pertamanya yaitu tergolong kedalam Operasional Tipe A atau Pola I ini yang dimana diartikan sebagai suatu konsep yang dapat disusun didasarkan pada sebuah operasi yang akan dilakukan, sehingga dengan hal tersebut akan menyebabkan suatu gejala atau suatu keadaan yang dimana dapat diartikan menjadi nyata atau sesuatu yang dapat terjadi.

b. Definisi Operasional Tipe B

Definisi Operasional Tipe B atau Pola II yaitu suatu konsep yang kemudian dapat disusun, yang dimana didasarkan pada bagaimana objek tertentu dapat didefinisikan dan kemudian dapat dioperasionalkan. yaitu berupa tentang apa yang sedang dilakukan atau apa yang dapat menyusun karakteristik-karakteristik dinamisnya.

c. Definisi Operasional Tipe C

Definisi Operasional Tipe C atau Pola III yaitu suatu konsep yang dimana dapat disusun dan didasarkan pada penampakan seperti apakah objek atau suatu gejala yang didefinisikan, dan lebih tepatnya yaitu apa saja yang menyusun karakteristiknya.

Selain itu terdapat juga beberapa definisi mengenai operasional menurut para ahli yang diantaranya yaitu menurut Walizer dan Wienir mendefinisikan operasional adalah suatu seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana juga mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan dapat membantu kita untuk mengklarifikasi gejala di sekitar ke dalam kategori

khusus dari suatu variabel. Sedangkan menurut Singarimbun adalah sebagai suatu unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep yang digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata dan dapat diketahui kebenarannya.

Sedangkan konsep itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dipahami, yang berisikan pernyataan, gagasan, ide yang dimana saling berkaitan dengan peristiwa atau yang menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Dan secara keilmuan konsep ini berarti suatu objek, ide atau peristiwa. Definisi konsep menurut Aristoteles (*The Classical Theory of Concepts*) bahwa konsep merupakan unsur terpenting dalam pembentukan ilmu pengetahuan dan filsafat pemikiran manusia. Dengan demikian maka operasional dapat berjalan atau dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila terdapat konsep-konsep yang menjadi komponen utama didalamnya.

Operasional dan konsep sangatlah diperlukan dalam sebuah penelitian yang dimana sangat berguna dalam mempelajari variabel atau objek yang sedang diteliti dan akan mempermudah dalam mencari data di lapangan dan mengolah data yang telah didapat dari lapangan atau observasi, dan jika dilihat dari bagaimana proses yang akan dilakukan. Maka dapat diartikan bahwa sistem operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses dan bagaimana cara untuk mempelajari suatu variabel atau objek yang sedang diteliti guna mendapatkan informasi mengenai

karakteristik-karakteristik dari objek tersebut, selain itu juga konsep merupakan sesuatu yang sangat penting guna mempermudah pengerjaan suatu penelitian yang dimana konsep itu sendiri berisikan suatu pemikiran, ide atau gagasan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik.

Dalam peneliti ini lebih cenderung kepada Definisi Operasional Tipe C yang diamana didasarkan seperti apa penampakan objek atau gejala yang terjadi, sesuai dengan variabel atau objek yang akan diteliti yaitu pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya maka kata lain bahwa operasional yang dilakukan dalam penelitian ini ialah bagaimana cara peneliti bisa mendapatkan dan menggali informasi-informasi penting yang dimana kemudian akan diolah sesuai konsep atau ide yang sudah tersedia dan sudah terpikirkan sebelumnya.

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa daftar dari penelitian terdahulu yang dianggap sangat relevan dalam memberikan sedikit informasi dan membantu menganalisis bagaimana penyelesaian penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimana digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini :

1. Penelitian yang pertama yaitu penelitian yang berjudul keterlibatan elit lokal dalam peningkatan partisipasi politik pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten toraja utara tahun 2015 yang ditulis oleh Muhamad Fadli pada tahun 2018.

Keikutsertaan dari para elit lokal yang dimana ikut berperan didalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten toraja utara tahun 2015 yang dimana para elit politik ini memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat, hal ini tidak lain karena peran elit politiknya yang berhasil memberikan edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat yang dimana hal tersebut mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin yang dimana etika dalam partisipasi politik pun harus dijunjung tinggi pada pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten toraja utara 2015. Keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya dilakukan oleh para elit politik yang tergabung didalamnya, melainkan juga berkat adanya dukungan dari masyarakat yang dimana memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dan selalu ikut serta dalam pilkada yang dilaksanakan. Dan untuk keberhasilan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati di kabupaten toraja utara yaitu berkat adanya peran elit yang dimana berhasil untuk memobilisasi masyarakat dan memberikan pemahamannya untuk menarik perhatian masyarakat dalam memilih pasangan calon tersebut, sebagai contoh yaitu adanya peran elit agama yang dimana terdapat seorang pemuka agama atau pendeta di tanah toraja yang dimana beliau mampu memobilisasi jemaatnya untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati yang didukungnya.

2. Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang berjudul pengaruh elit politik terhadap elektabilitas calon anggota legislatif partai demokrat dapil 2 pada

pemilu tahun 2014 di kota makasar yang ditulis oleh Muhammad Yunus pada tahun 2015.

Peran elit politik di dalam aktivitasnya untuk dapat memobilisasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya sangat besar, terutama peran elit politik partai Demokrat dapil 2 yang dimana memenagkan suara terbanyak saat pemilu 2014 tersebut. Hal itu dikarenakan peran elit politik yang dimana mampu dan berhasil secara maksimal dalam mempengaruhi masyarakat serta dapat memobilisasi masyarakat sesuai dengan keinginan partai dan aktivis-aktivis partainya yang dimana menjadikan para elit politik sebagai agen untuk mendapatkan suara rakyat. Bentuk dan strategi elit politik inilah yang sebenarnya menjadi senjata dimana dapil 2 partai demokrat dapat memenangkan suara terbanyak dalam pemilu 2014.

3. Penelitian yang ketiga yaitu yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat di kelurahan tatura utara kecamatan palu selatan pada pilkada kota palu tahun 2015 yang dimana penelitian ini di tulis oleh Rina Rahman Oliy dan Asep Mahpudz Imran pada tahun 2017.

Partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu atau pilkada sangatlah berpengaruh besar bagi penentuan kemenangan yang dimana suara yang didapatkan menjadi tolak ukur pemenangan suatu partai atau calon pemimpin di dalam pemilu atau pilkada, berdasarkan hasil analisis yang dimana di lakukan di kota palu terhadap pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik politik masyarakat di kelurahan tatura utara memiliki angka yang signifikan. Yang dimana berarti secara gars besar bahwa pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap partisipasi politik

masyarakat hal tersebut bukan lain karena pengetahuan dan kesadaran politik inilah yang dimana di dapatkan oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan, tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan itu sendiri yang dimana mampu memberikan dorongan terhadap seorang individu dalam melakukan tindakan politik atau tindakan berpartisipasi dalam politik.

4. Penelitian yang keempat yaitu penelitian yang berjudul pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di desa hajimena kecamatan natar kabupaten lampung selatan yang dimana ditulis oleh Maya Yuliantina pada tahun 2016.

Tingkat kesadaran politik masyarakat di desa hajimena kecamatan natar kabupaten lampung selatan masih memiliki tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik yang rendah, yang dimana dalam penelitian ini tingkat kesadaran politik dari masyarakat itu sendiri hanya berkisar diangka 2,57% yang dimana hal itu menunjukkan betapa rendahnya tingkat kesadaran politik di masyarakat. Dengan persentasi yang seperti itu menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat di desa hajime kecamatan natar termasuk kategori yang sangatlah rendah, dan tingkat partisipasinya seklipun sangat rendah yang dimana angka yang dihasilkan berdasarkan hasil penghitungan analisis yaitu hanya menunjukkan angka 31,3% yang dimana tergolong rendah dan menggambarkan bahwa partisipasi masyarakatnya sangatlah rendah. Maka dengan itu tingkat kesadaran politik dan partisipasi politik di desa hajimena kecamatan natar kabupaten lampung selatan haruslah bisa diperbaiki dengan cara memberikan edukaksi mengenai kesadaran dan betapa pentingnya

partisipasi politik untuk menentukan pemimpin yang baik dan sesuai dengan keinginan rakyat dimana sebagai masyarakat yang hidup di negara demokrasi.

Peneliti melihat konteks dimana betapa pentingnya pengaruh elit politik terhadap kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik, yang dimana dilihat dari segi politis, kearifan lokal dan nilai-nilai yang dimana mampu mempengaruhi masyarakat di Dusun Cikondang Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik dan memunculkan kesadaran politik di masyarakat.

C. Kerangka Pemikiran

Pemilihan umum merupakan suatu bukti dimana suatu pemerintahan telah melaksanakan kewajibannya sebagai negara yang demokrasi, dan sebagai negara yang demokrasi Indonesia melakukan kegiatan pemilu sebagai sarana untuk memilih seorang pemimpin yang legal dan sah yang tentunya terdapat andil yang kuat dari masyarakat dalam memberikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Miriam : 2008).

Pemilihan umum dilakukan untuk menentukan seorang pemimpin baik itu dari tingkat Presiden dan Wakil presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati hingga tingkat Kepala Desa. Yang dimana mereka merupakan pemimpin yang sah dan legal secara hukum dikarenakan dipilih melalui seleksi dan hasil penghitungan suara yang diberikan oleh masyarakat dalam bentuk partisipasi politik dengan di dasari kesadaran politik dari individu tersebut, dan tingkat partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk

legalitas dari kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin atau calon pemimpin yang mereka pilih.

Terdapat dua bentuk partisipasi politik yang dimana memiliki kesadaran politik sesuai dengan kehendaknya sendiri atau sesuai dengan hati nuraninya, dan ada juga bentuk partisipasi politik yang dimana kesadarannya terdorong oleh pengaruh dari luar yang dimana berhasil memobilisasi apa yang dia inginkan dalam berpartisipasi politik. Keberhasilan suatu penyelenggaraan pemilu atau pilkada bukan hanya atas kerjasama penyelenggara saja akan tetapi terdapat faktor-faktor lain yang diantaranya yaitu peran penting dari para elit politik dan elit desa yang bekerja keras untuk dapat mempengaruhi dan memobilisasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Peran elit desa di Pemilihan Kepala Desa di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap yaitu berperan sebagai tim sukses atau yang biasa disebut pendukung kemenangan dari para calon Kepala Desa yang diusungnya, terdapat beberapa elit politik yang dimana memobilisasi masyarakat khususnya di Dusun Cikondang Desa Datar untuk memberikan dukungan dan suaranya dalam pemilihan Kepala desa yang akan di laksanakan. Peran elit desa inilah yang dimana membantu pasangan calon Kepala Desa dalam kampanye visi dan misi yang dimana hal tersebut merupakan salah satu cara dengan teknik marketing politik, dan marketing politik dilakukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dan simpati dari masyarakat (Firmanzaah : 2008).

Dan terdapat cara lain yang dimana ditepuh oleh para elit politik ini yaitu dengan memimta bantuan dan membentuk kerjasama dengan para pejabat yang

dinggal di daerah setempat yang dimana tentunya memiliki pengaruh dan dikenal luas oleh masyarakat. Dan bentuk kerjasama tersebut berupa strategi marketing politikk yang dilakukan dengan cara menyajikan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dari calon Kelapa Desa yang tentunya sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan cara ini maka masyarakat akan dengan mudah terpengaruh dengan baik.

Sementara itu peran dari tokoh agama atau elit agama yang dimana bertujuan memberikan pengarahan terhadap masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan kehendaknya masing-masing, akan tetapi tidak sedikit pula dari para tokoh agama ini atau elit agama ini yang menjadi salah satu anggota dari tim kampanye pemenangan calon Kepala desa. Elit agama ini tentunya memiliki pengetahuan keagamaan dan pemahaman religius yang mendalam, tentunya hal tersebut menjadi cara bagaimana elit ini mendapatkan perhatian dan suara masyarakat untuk memberikan peluang kemenangan bagi calon yang di usungnya. Elit agama sendiri menjadikan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti halnya dengan pengajian, tabligh akbar atau kegiatan rohani lainnya sebagai sarana dimana elit ini berkampanye baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dan tentunya hal tersebut merupakan salah satu strategi politik yang cukup efektif.

Sama halnya dengan tokoh agama bahwa tokoh adat sekalipun tidak luput menjadi incaran dari para elit desa yang dimana menginginkan tokoh tersebut menjadi salah satu dari tim sukses dalam satu calon, tidak berbeda jauh dengan tokoh agama. Tokoh adat sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar di

lingkungan adat masyarakat maka dengan cara itu akan mudah didalam berkampanye untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Adanya keterlibatan elit politik desa di dalam proses Pemilihan Kepala Desa di Dusun Cikondang Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur merupakan salah satu faktor dimana partisipasi politik dari masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, meski tidak dapat dipungkiri bahwa peran elit desa bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemilihan tersebut akan tetapi peran dari elit-elit politik sangatlah efektif jika dibandingkan dengan cara lain.

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyusun kerangka berpikir sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara untuk sebuah rumusan masalah, yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya secara empiris berdasarkan data dilapangan (Sugiyono : 2013).

Berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Elit Politik Desa Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkades Desa Datar Tahun 2019, yang dimana sesuai dengan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis yang akan diuji dan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

HO : Tidak terdapat pengaruh signifikan pada elit politik desa terhadap partisipasi politik masyarakat di dusun cikondang desa datar kecamatan dayeuhluhur pada pilkades desa datar tahun 2019.

HI : Terdapat pengaruh signifikan pada elit politik desa terhadap partisipasi politik masyarakat di dusun cikondang desa datar kecamatan dayeuhluhur pada pilkades desa datar tahun 2019.

(Tidak terdapat korelasi atau hubungan jika, maka Ho diterima Hi ditolak)

(Terdapat korelasi atau hubungan jika, maka Ho ditolak Hi diterima)